

**“SKALA” SEBAGAI ATRIBUSI KULTURAL:
KONTRIBUSI ANTROPOLOGIS DALAM STUDI EKOLOGI POLITIK**

Pangeran P.P.A. Nasution¹, Nur Anggraeni²

¹Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Minat Studi Antropologi,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

²Peneliti Sosial Budaya, *Senarai Indonesia*, D.I. Yogyakarta
pangeran9688@gmail.com,¹ nurie.anggraeni@gmail.com²

Abstract

The environment is as place where people live while providing various possibilities to meet their needs. Humans are connected to nature through culture by a system of symbols, meanings, and values. The problematic relation between humans and the environment currently known as “hybrid complexity” involves another analytical tradition such as political economy, symbolic anthropology, and historical anthropology. Political ecology as a study with a transdisciplinary perspective try to gain an explanation about the relationship between humans and the environment not in a static and harmonious fabricate, but in chaotic (noisy and complicated) interconnections. The basic assumption of the study of political ecology is the issue of inequality: the existence of asymmetric forces that produce socio-economic inequality, and these problems are present in the relation between human life and the environment.

Humans relate to the environment through a diverse network of interests at various levels and multi-capacities. The scale is one of the important concepts that deserve scrutiny in order to understand the workings of the political ecology approach. The scale is the “heuristic terminology” of culture. Humans are the main element of the scale that connects culture to its reality and as a feature of culture itself. Thus, the scale can be understood as a cultural attribution of the unit of explanation which includes the size, level, and relations of events and actions that mediate human relations and the environment of natural phenomena and socio-cultural phenomena.

Keywords: Scale, Cultural Attribution, Anthropology, and Political Ecology.

¹ Staf Pengajar pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe, Aceh.

1. Pendahuluan

Studi ekologi dalam antropologi yang berupaya melihat relasi antara manusia dengan lingkungan hidup tidak bisa sekadar dipahami sebagai uraian tentang adaptasi kultural terhadap determinasi lingkungan. Kluster perspektif demikian itu yang bermaksud menghasilkan gambaran ‘posibilisme’ tentang berbagai morfologi sosial-kultural, sebagian besar termasuk ke dalam studi ekologi budaya (lihat Dove & Carpenter, 2008; Haenn & Wilk, 1988). Studi ekologi dalam antropologi tidak juga berhenti pada klaim ekosistemik, bahwa hubungan manusia-lingkungan secara sistematis diasumsikan memiliki sifat pengaturan diri yang rekat pada kondisi ekosistem.

Aletta Biersack (1999) menggugah perhatian studi antropologi ekologi dengan konsep “ekologi baru” (new ecology), bahwa relasi problematis antara manusia dengan lingkungan merupakan “kompleksitas hibrid”. Biersack (1999) menegaskan bahwa kompleksitas relasi antara manusia dengan lingkungan yang hibridatif merupakan konteks ekologis yang terhubung dengan tradisi analisis yang lain, seperti ekonomi politik, antropologi simbol, dan antropologi historis. Biersack (1999) menyoroti tentang kompleksitas ekologi baru dengan nalar analitik yang meliputi ekologi simbolik, ekologi historis, dan ekologi politik.

Relasi antara manusia dengan lingkungan hidup melibatkan aspirasi ekonomi dengan tendensi sosial-politik terhadap lingkungannya (Roseberry, 1998; Wolf, 2010). Terjadi peralihan asumsi dalam studi antropologi ekologi yang kini melihat relasi manusia dan lingkungan tidaklah bersifat netral atau dengan sangkaan determinasi lingkungan yang absolut. Lingkungan semestinya dipandang sebagai realitas “politized environment” yang melibatkan banyak aktor dengan multi-kepentingan di tingkat lokal, regional, maupun global (Peet & Watts, 2004).

Pada akhir abad ke-20, permasalahan lingkungan dianggap tetap tidak terpecahkan ketika dipahami secara terpisah oleh setiap latar keilmuan, dan juga karena mengabaikan konteks sosial-kultural yang menjadi arena berlangsungnya permasalahan lingkungan tersebut. Hingga kini, penjelasan tentang krisis lingkungan mengalami kebuntuan yang tidak terbantahkan. Tampaknya masih menjadi persoalan bersama bagi para ilmuwan untuk mengajukan pertanyaan tentang permasalahan lingkungan dengan cara berpikir yang baru (Escobar, 1999; Forsyth, 2003). Krisis lingkungan kini juga merupakan krisis atas identitas lingkungan itu sendiri. Pemaknaan terhadap lingkungan telah mengalami peralihan seturut dengan riwayat historis yang diliputi oleh permasalahan kultural, sosial-ekonomi, dan perihal politis yang menyertainya (Escobar, 1999).

Lebih lanjut, tentang bagaimana permasalahan lingkungan dalam hubungannya dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat menjadi suatu “pemikiran yang tersituasikan” (*situated science*). Sebagaimana dikemukakan oleh Rocheleau (2008), bahwa sangatlah tidak diperlukan dan mungkin tidak patut bagi para ilmuwan untuk memilih antara peran akademisi, praktisi dan kepentingan pemangku kebijakan dalam

menjelaskan tentang problem lingkungan yang terjadi. Justru sepatutnya meninggalkan dikotomi yang ada dan kemudian menuangkan aspirasi pemosisian kepentingan dimaksud dalam satu jaringan pemahaman, meskipun tidak luput bersemilih dalam mendeskripsikan rangkaian permasalahan lingkungan.

2. Tinjauan Pustaka

Ekologi politik adalah pendekatan untuk analisis sosial-lingkungan yang telah mendapatkan momentum selama beberapa dekade terakhir dalam bidang antropologi, studi pembangunan, dan sejarah lingkungan (Benjaminsen & Robbins, 2015). Ekologi politik muncul pada era tahun 1970-an dilatari oleh kritik Marxis terhadap ide-ide Malthus dalam pemikiran lingkungan. Menurut Cancela (2019), ekologi politik adalah *“a political, intellectual and cultural movement that is interested in the concrete human being as part of nature”* (Hlm. 418). Ekologi politik terbentuk sebagai ruang pertemuan berbagai bidang pengetahuan dengan perspektif kritis terhadap kontradiksi teoritis dan politik modernitas (M. V. Cancela, 2019a). Ekologi politik membangun kerangka kerja analitis, teoretis, dan epistemologis di luar teori ekonomi dominan dan cenderung membawa perubahan besar dalam wacana/praktik dominan (M. V. Cancela, 2019a).

Ekologi politik juga telah lama melibatkan masalah etika (Sundberg, 2015). Secara historis, pertanyaan normatif tentang ketidaksetaraan global dan keadilan sosial-ekologis telah mendominasi penelitian yang menggunakan ekologi politik sebagai perangkat analisisnya. Meski demikian, Robbins (2020) menyatakan bahwa ekologi politik harus mencari cara untuk mengubah, meningkatkan, berinovasi, memulihkan hal-hal yang dianggapnya mengalami disfungsi. Tidak selalu menyampaikan kritik. Dalam literatur yang demikian berlimpah, tidak mudah menemukan karakterisasi ekologi politik secara ringkas. Namun ada beberapa jenis ekologi politik yang dibedakan menurut skala studinya. Pertama, *regional political ecology* yang sudah banyak digunakan oleh para akademisi (Larsen, 2016; I. McKinnon & Hiner, 2016). Kedua, *urban political ecology* yang menekankan pendekatan tertentu untuk mempertimbangkan kota di sejumlah tema—perubahan iklim, sanitasi, dan infrastruktur—menggunakan pendekatan politik yang lebih eksplisit (Nzeadibe et al., 2018). Kemudian beberapa studi mempertanyakan ulang skala yang digunakan dalam ekologi politik dan menawarkan pendekatan baru. Misalnya Miller & McGregor, 2019 yang menawarkan pendekatan *world regional*. Bahkan I. McKinnon & Hiner (2016) mengatakan bahwa kemunculan *urban political ecology* memecah literatur menjadi biner geografis lain sehingga penggunaan konsep *‘regional’* menjadi tidak konsisten dan tidak jelas.

3. Metodologi

Pembahasan di dalam artikel ini diuraikan dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan representasi kontributif antropologis yang berkaitan dengan topik kajian. Penelitian kepustakaan menjadi sandaran pemikiran dalam membangun model atau konseptualisasi teoretis baru. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa terdapat beragam pendekatan dalam penelitian kepustakaan. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan ‘ulasan kritis-integratif’ sebagai salah satu pendekatan dalam bentang penelitian kepustakaan. Pendekatan tersebut berdaya guna dalam memaparkan evaluasi teoretis dengan menilai, mengkritik, dan mensintesis yang memungkinkan kehadiran kerangka kerja dan perspektif teoretis baru maupun persaingan antar pandangan teoretis yang menyertainya. Pendekatan ‘ulasan kritis-integratif’ memeriksa konten narasi teoretis yang diperbincangkan atau dikonseptualisasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok ilmuwan, dan perkembangannya dari waktu ke waktu yang melibatkan multi-tradisi keilmuan (lihat Torraco, 2005; Wong et al., 2013; Snyder, 2019).

4. Pembahasan

Istilah ekologi kini terokupasi sebagai terminologi teknis yang mengidentifikasi ruang bagi relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kondisi lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan juga dilihat sebagai hasil hubungan antara manusia dan spesies lainnya melalui kepentingan yang diidamkan manusia (*anthroposcene*). Ekologi politik sebagai frase teoretis tampil dalam gagasan kajian antara manusia dengan kepentingannya (*interest of needs*) dan lingkungan dengan daya dukungnya (*capabilities*) sebagai perihal yang inheren dengan dinamika politis (Peet & Watts, 2004). Ekologi politik dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kajian ekologi budaya (*cultural ecology*).

Ekologi politik dalam studi antropologi melibatkan perhatian terhadap keterkaitan kepentingan ekonomi, politik, dan kondisi lingkungan. Seiring perkembangannya, banyak sekali definisi dan penjelasan tentang ekologi politik. Namun dalam tulisan ini diajukan pemahaman ekologi politik sebagai pendekatan dalam studi antropologi ekologi yang memadankan perhatian terhadap persoalan ekologi dan kepentingan ekonomi-politik secara luas. Pendekatan ekologi politik menaruh perhatian terhadap dialektika antara masyarakat dengan sumberdaya lingkungan dan juga dialektika kelas sosial pada suatu kelompok masyarakat (Peet & Michael Watts., 2004; Peluso, 1993;2017).

Lingkungan yang Terpolitisir (*Politized Environment*)

Ekologi politik mulai berkembang sejak akhir dekade 1970an dan awal 1980an.

Ekologi politik merupakan studi dengan perspektif trans-disiplin yang berupaya mencermati relasi antara manusia dengan lingkungan bukan dalam jalinan yang statis dan harmonis, melainkan berkelindan secara *chaotic* (gaduh dan rumit). Asumsi mendasar dari studi ekologi politik adalah pada persoalan ketidaksetaraan (*inequality*), yakni adanya kekuatan asimetrik yang menghasilkan kesenjangan sosial-ekonomi, dan permasalahan tersebut hadir dalam temali relasi kehidupan manusia dan lingkungan (lihat Peet & Michael Watts., 2004; Peluso, 1993, 2017; Wolf, 2010).

Ketidaksetaraan sebagai basis asumsi dalam studi ekologi politik bukanlah entitas teoretik yang ahistoris. Gagasan *cultural histories* yang diraih dari pemikiran Wolf (2010) ditegaskan oleh Roseberry (1988) sebagai salah satu domain analisis yang penting dalam studi ekologi politik, yakni tentang residu kapitalisme terhadap kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan. Roseberry (1988:162) menegaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat erat terhubung dengan riwayat historis yang sangat panjang, dan itu meliputi empat (4) hal utama: 1) Kolonialisme; 2) Perkembangan Otorita Kekuasaan; 3) Perdagangan Internasional; dan 4) Formasi Negara.

Dengan demikian, kekuatan-kekuatan asimetris terbentuk melalui peristiwa-peristiwa menyejarah yang terakumulasi sebagai latar endemik ketimpangan ekologis (konservatif dan eksploitatif) terhadap kesenjangan sosial-ekonomi (keberlanjutan dan marginalisasi) (Peet & Watts, 2004; Peluso, 1993, 2017; Roseberry, 1998). Kondisi ekologis dan perekonomian berkembang dengan cara serta kecepatan yang berbeda. Kapasitas (terbawa) ekologis sebagai sistem pendukung kehidupan manusia kini dipertanyakan, dan ini suatu kondisi yang mencemaskan (Peet & Watts, 2004). Arti dari istilah seperti “keberlanjutan” (*sustainable*) lingkungan, misalkan, kini dipertanyakan dan diperebutkan (Peet & Watts, 2004). Apa pun ambiguitas semantiknya, keberlanjutan memiliki efek dari keterhubungan tiga diskursus yang relatif tidak terpisahkan: *Pertama*, tentang krisis lingkungan secara global; *Kedua*, kekhawatiran terhadap demografi global (momok Malthusian); dan *Ketiga*, tentang risalah kegaduhan terhadap ketidaksetaraan ekonomi global yang berkaitan dengan akumulasi sumber daya alam (Peet & Watts, 2004).

Ekologi politik sebagai suatu perspektif dalam studi antropologi ekologi dengan demikian berupaya memahami kondisi-kondisi sosial dan politik yang melingkupi penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan. Risalah problematika lingkungan dilihat sebagai inter-relasi fenomenologis dari proses biofisik, kebutuhan manusia, dan sistem politik yang lebih luas. Penyelidikan dalam ekologi politik berupaya memeriksa kekuatan-kekuatan politik (makro dan mikro), kondisi dan konsekuensi perubahan lingkungan, aspek spesifik dari perubahan lanskap lingkungan, dan efek perubahan lingkungan dari dan bagi kondisi sosio-ekonomi serta politik. Satu catatan atributif yang patut dicermati adalah ekologi politik sebagai metodologi kritis berperan

penting dalam upaya menggapai keadilan sosial atas problematika lingkungan pada skala global.

Ekologi Politik sebagai Konstruksi Saintifik

Oleh sebagian kalangan ilmunan, ekologi politik dikatakan bermaksud menengarai paradoks antara “realisme” lingkungan, yakni keteguhan pandangan tentang “kenyataan biofisik” yang menjadi panduan penjelasan terhadap upaya-upaya yang mengintegrasikan prediksi biofisik sebagai bagian dari konstruksi sosial-ekonomi, kultural maupun politik (Forsyth, 2003). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Neumann (2005), bahwa krisis lingkungan dalam pandangan ekologi politik merupakan konstruksi saintifik yang dihasilkan dari jalinan pemahaman ekologi budaya dengan ekonomi politik.

Ekologi politik sebagai suatu konstruksi saintifik yang bermaksud mengatasi kebuntuan penjelasan tentang keterhubungan problematik antara krisis lingkungan dengan keberlanjutan kehidupan manusia setidaknya menunjukkan dua kecemasan yang penting, dan semakin tidak dapat dihindarkan. *Pertama*, upaya eksplanasi yang menegaskan intervensi aspek sosial dan politik terhadap krisis lingkungan seperti telah menggerus daya penjelasan yang memadai. Kebuntuan penjelasan tersebut disebabkan oleh pendigdayaan kondisi biofisik lingkungan sebagai sentra penyebab bagi permasalahan lingkungan dan meniadakan keberadaan manusia yang terhubung dengan lingkungan melalui ragam kepentingannya. *Kedua*, pelibatan isu kepentingan manusia terhadap lingkungan yang bertendensi politis justru menghasilkan rangkaian eksplanasi yang asimetrik. Penjelasan yang diajukan seringkali menjadi semacam peradilan yang memvonis manusia sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap degradasi lingkungan (lihat Blaikie & Brookfield, 1987; Bryant, 1992; Forsyth, 2003; Zimmerer, 2000).

Penetapan vonis sedemikian itu sering dikaitkan dengan latar kemiskinan dan terancamnya keberlanjutan mata pencaharian pada suatu kelompok masyarakat. Pihak tertuduh dinyatakan telah melakukan apropriasi terhadap perilaku eksploitasi lingkungan yang berkonsekuensi terhadap degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, sudah semestinya dilakukan upaya mengatasi kedua orientasi perspektif yang problematis tersebut. Salah satunya dengan mengeksplorasi jaringan deskripsi penjelasan hubungan antara sains lingkungan dan masyarakat untuk menghindari replikasi rantai eksplanasi yang dikotomik. Dengan begitu, akan memungkinkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang relasi antara kenyataan biofisik yang berkelindan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan kultural sebagai perihal yang tersituasikan secara politis.

Skala: Atribusi Kultural Relasi Manusia – Lingkungan dalam Ekologi Politik

Manusia berelasi dengan lingkungan melalui jalinan kepentingan yang begitu beragam pada berbagai tingkatan dan multi-kapasitas. Skala merupakan salah satu konsep penting yang patut dicermati guna memahami cara kerja dari pendekatan ekologi politik. Skala merupakan satuan ukuran relasional yang mampu menjadi basis penjelasan dalam menguraikan kepentingan manusia terhadap lingkungan, termasuk tentang implikasi yang menyertainya. Setiap model pemahaman tentang skala akan mencerminkan sebagian pengalaman dari bingkai sosial dan politik yang dihasilkan dari proses investigasi keilmuan. Pengertian dari skala dapat dijelaskan secara “transitif” (sebagai konstruksi sosial dan tidak stabil maknanya), dan secara “intransitif” (mengacu pada realitas yang mendasar dan dianggap stabil maknanya) (Bhaskar, 1975).

Konsep skala kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam pemahaman empirisme (pengalaman terindra); aktualisme (penetapan peristiwa atas pengalaman); dan realisme (penilaian mendasar bagi penetapan peristiwa dan pengalaman). Melalui klasifikasi semacam itu, skala menjadi suatu atribusi antropologis terhadap indikasi jangka pendek dari transisi jangka panjang; dan skala sebagai gejala transitif mencerminkan pengalaman parsial dari peristiwa biofisik yang kompleks (Jackson, 1997). Selain itu, skala juga meliputi dimensi ruang dan waktu yang acapkali menuai ketegangan analisis dari kedua dimensi tersebut. Skala dalam dimensi ruang diterjemahkan sebagai “tempat” maupun “wilayah” yang sejak lama menjadi bagian dari analisis ekologi politik untuk menjelaskan tentang relasi antara manusia dan lingkungan (Zimmerer & Bassett, 2003).

Rangkaian upaya yang terus berlanjut dalam pengembangan kajian ekologi politik sebagai konstruksi saintifik mencerminkan kepatutan inovasi teoritis terhadap pengertian konsep skala (lihat Swyngedouw, 1997, 2004). Blaikie & Brookfield (1987:17) menulis bahwa kompleksitas interaksi manusia dan lingkungan menghendaki suatu pendekatan yang mencakup penjelasan tentang perbedaan antara skala sebagai “rupa geografis”, dan skala sebagai hierarki organisasi sosio-ekonomi: kelompok manusia, rumah tangga, desa, wilayah, negara bagian, dunia, dan lain sebagainya. Skala bukan hanya sebagai satuan penjelasan tentang manusia sebagai aktor atau keterkaitannya dengan proses biosifik pada lingkungan semata. Skala patut dikatakan sebagai bagian dari konstruksi sosial, berkontingensi secara historis, dan diperebutkan secara politis (lihat Brown & Purcell, 2005; Lefebvre, 1991; Manson, 2008; McCarthy, 2005; Sayre, 2005; Swyngedouw & Heynen, 2003).

Skala menjadi problematis ketika hanya digunakan sebagai satuan pendeskripsi yang bersifat umum, bukan sebagai konsep teoretis yang reflektif (Swyngedouw & Heynen, 2003; Zimmerer & Bassett, 2003). Perlu dilakukan identifikasi antara skala secara geografis yang diartikan sebagai kondisi spasial dengan skala sebagai hierarki organisasi sosial ekonomi (Brown & Purcell, 2005). Kepentingannya adalah untuk mengantisipasi dan menghindari kebingungan konseptual, misalnya terhadap

permasalahan tentang “lokalitas” sebagai artikulasi skala secara kultural –yang sering dikaitkan dengan hierarki agensi (pada masyarakat) (lihat Marston, 2000).

Skala dalam pengertian kultural dapat diartikan sebagai satuan penjelasan yang bersifat lokal dan memiliki kualitas yang melekat di dalamnya (lihat Neumann, 2005:85–92). Pengidentifikasian konsepsi skala yang multidisipliner kini menjadi suatu keharusan guna menghasilkan pendekatan ekologi politik yang tidak hanya rekat pada satu poros keilmuan (Manson, 2008; Sayre, 2005). Kehendak semacam ini dikatakan oleh (Sayre, 2005: 280-81) sebagai momen epistemologis terhadap konsepsi skala yang secara “alami” terkait dengan proses ekologis dan interaksi yang terjalin antara manusia dan lingkungan (temporal dan resolusi spasial); kemudian secara “politik” mengacu pada “ukuran dan durasi”. Dengan demikian, skala dapat dipahami sebagai satuan penjelasan tentang ukuran, level, dan relasi dalam peristiwa maupun tindakan yang mengantarai manusia dan lingkungan, –selanjutnya secara bersamaan dipahami sebagai fenomena alam dan sosial-kultural.

Skala oleh Sayre (2005) dikatakan sebagai perihai yang bergerak di sepanjang kontinum dari realisme dan konstruksionisme: dari kondisi fisik maupun sistem biologis dalam lingkungan hingga melalui sistem lingkungan yang berimplikasi terhadap sistem sosial, kultural, dan ranah kebijakan. Skala dengan demikian secara kontingen berangkat dari dan menuju kepada ketidakstabilan, kemunculan, ketiadaan, pergeseran kesetaraan, ketidakpastian, dan ketergantungan pada banyak fitur skala yang bersifat kontingen. Sementara ini, pemahaman terhadap konsep skala dalam ekologi politik setidaknya terpumpun dalam tiga kluster perbincangan teoretis: Pertama, tentang interaksi kekuasaan, agensi, dan skala; Kedua, skala sebagai proses sosio-lingkungan; Ketiga, tentang skala dan jejaring relasi. Hubungan kuasa dalam fitur skala dikatakan sebagai sentra kerangka berpikir bagi ekologi politik (Molle, 2007; Swyngedouw, 2004).

Fitur skala selanjutnya dalam ekologi politik adalah tentang sentralitas dan kesatuan antara proses biofisik terhadap konstruksi skala secara sosial-kultural (McCarthy, 2005). Sebagai misal, desakan ekologis terhadap kepentingan produksi ekonomi oleh masyarakat. Sementara itu, Zimmerer, 2000:153) mengemukakan bahwa ekologi politik berfokus pada pen-skala-an sosio-lingkungan yang terjadi dalam proses peleburan biogeografi yang secara luas terhubung dengan kehidupan sosial-kultural. Gagasan seperti ini menaruh perhatian bahwa konsep skala menjadi ukuran bagi kapasitas lingkungan yang secara biofisik membentuk dinamika ekonomi-politik (Zimmerer, 2000; Zimmerer & Bassett, 2003).

Skala dengan demikian merupakan pumpunan hibriditas dan rekonstitusi antara alam dan masyarakat (Natter & Zierhofer, 2002; Swyngedouw & Heynen, 2003). Berbagai terminologi dihadirkan para ahli ekologi politik guna menjarang karakter dialektik dari skala perubahan sosial dan lingkungan, seperti *socio-ecological*, *socio-environmental*, dan *socio-natural* (Heynen, 2003; Swyngedouw & Heynen, 2003; Zimmerer, 2000)). Terminologi tersebut dimaksudkan untuk mengantarai perihai sosial dan

ekologis, material dan simbolis, dinamika spasial dan temporal yang secara kolektif merupakan fokus analitik terhadap skala dalam ekologi politik.

Konsep skala dalam ekologi politik selanjutnya dapat dikatakan bermaksud menjelaskan relasi dan kualitas jaringan atas konfigurasi spasial dengan dinamika sosio-lingkungan (Natter & Zierhofer, 2002; Swyngedouw, 2004; Zimmerer & Bassett, 2003). Jejaring relasi atas skala kemudian juga dianggap mengartikulasikan teritorial sebagai hasil konfigurasi bentang alam oleh aktor manusia dan non-manusia, dan tunduk pada berbagai interpretasi yang bersifat spasial dan temporal (Swyngedouw, 2004). Pendekatan semacam ini mengusung pemahaman tentang strategi kehidupan masyarakat di suatu lanskap alam tanpa mengabaikan keberlanjutan dari keanekaragaman hayati, dan perihal inilah yang dikatakan sebagai jaringan relasi sosio-lingkungan. Dengan demikian, secara metodologis, skala dalam ekologi politik merupakan konstruksi sosial, bersifat relasional, kontingen, dan diperebutkan di dalam kerangka hubungan kekuasaan yang dialektis antara masyarakat dan lingkungan pada berbagai tingkatan.

5. Penutup

Lingkungan hidup merupakan sarana atau tempat bagi kehidupan manusia dan sekaligus menyediakan berbagai kemungkinan untuk mengembangkan kebutuhannya. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk mengantisipasi, menanggapi, dan menghadapi perubahan lingkungannya guna memastikan kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Manusia tidak pernah secara langsung menghadapi lingkungannya (alam), manusia selalu mendekati alam melalui budaya, melalui berbagai sistem simbol, makna, dan nilai. Kebudayaan dalam hal ini merupakan refleksi atas sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan (Alland, 1975; Attfield, 2010; Escobar, 1999; Nasution, 2013; Poerwanto, 2008; Sutton & Anderson, 2004).

Berkaitan dengan skala sebagai salah satu konsep utama dalam kajian ekologi politik, maka, dapat dikatakan bahwa skala merupakan "*heuristic terminology*" dari kebudayaan. Manusia adalah unsur utama dari skala yang menjadi penghubung antara kebudayaan terhadap realitasnya dan sebagai fitur bagi kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, skala dapat dipahami sebagai atribusi kultural tentang satuan penjelasan yang meliputi ukuran, level, dan relasi dalam peristiwa maupun tindakan yang mengantarai relasi manusia dan lingkungan *junto* fenomena alam dan sosial-kultural. Skala merupakan perangkat simbolik dari segala sesuatu yang bersifat *material*, *behavioral*, dan *ideational*. Terutama dalam konteks ekologi politik, skala merefleksikan relasi antara manusia dan lingkungan dengan latar kepentingan ekonomi-politik yang menyertainya. Penerjemahan skala secara kultural menempatkan bentang analisisnya terhadap gejala perubahan lingkungan dan kultural dalam eksplanasi "global-lokal", bersama jejaring deskripsi yang bersifat "transitif-intransitif". Dengan demikian, skala

sebagai atribusi kultural mampu menyajikan penjelasan tentang relasi antara manusia dan lingkungan yang berkontingensi secara historis dan berasilasi secara politis.

6. Daftar Pustaka

- Alland, A. J. (1975). Adaptation. *Annual Review of Anthropology*, 4, 59–73.
- Attfield, R. (2010). *Etika Lingkungan Global*. Kreasi Wacana.
- Benjaminsen, T. A., & Robbins, P. (2015). Nordic political ecologies. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 69(4), 161–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00291951.2015.1059879>
- Bhaskar, R. (1975). *A Realist Theory of Science*. Leeds Book.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land and Society*. Methuen.
- Brown, J. C., & Purcell, M. (2005). There's Nothing Inherent About Scale: Political Ecology, the Local Trap, and the Politics of Development in the Brazilian Amazon." *Geoforum*, 36, 607–624.
- Bryant, R. L. (1992). Political Ecology: An Emerging Research Agenda in Third-World Studies. *Political Geography*, 11(1), 12–36. [https://doi.org/10.1016/0962-6298\(92\)90017-N](https://doi.org/10.1016/0962-6298(92)90017-N)
- Cancela, M. V. (2019a). Environment and Latest Trends in Social Sciences. In J. L. Sarasola Sánchez-Serrano, F. Maturo, & Š. Hošková-Mayerová (Eds.), *Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work (Studies in Systems, Decision and Control)* (Vol. 208). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0>
- Cancela, M. V. (2019b). Environment and Latest Trends in Social Sciences. In J. L. S. Sánchez-Serrano, F. Maturo, & Š. H.-M. (Eds.) (Eds.), *Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work (Studies in Systems, Decision and Control)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0>
- Dove, M. R., & Carpenter, C. (2008). "Major Historical Currents in Environmental Anthropology." *Dalam Environmental Anthropology: A Historical Reader*. Blackwell Publishing.
- Escobar, A. (1999). After Nature Steps to an Antiessentialist Political Ecology. *Current Anthropology*, 40(1), 1–30. <https://doi.org/10.1086/515799>
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.
- Greenberg, J., & Park, T. (1994). Political Ecology. *Journal of Political Ecology*, 1(1),

1–12.

Haenn, N., & Wilk, R. (Eds.). (2006). *The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living*. New York University Press.

Heynen, N. C. (2003). The Scalar Production of Injustice within the Urban Forest. *Antipode* (Vol. 35, Issue 5, pp. 980–998). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2003.00367.x>

Introduction: From the "New Ecology" to the New Ecologies. (1999). *American Anthropologist*, 101(1), 5–18. <http://www.jstor.org/stable/683337> Accessed: 27-07-2017 10:38 UTC

Jackson, C. (1997). Women in Critical Realist Environmentalism: Subaltern to the Species? *Economy and Society*, 26(1), 62–80.

Larsen, S. C. (2016). Regions of Care: A Political Ecology of Reciprocal Materialities. *Journal of Political Ecology*, 23(1), 159–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.2458/v23i1.20187>

Lefebvre, H. (1991). *The Social Production of Space*. Blackwell Publishing.

Manson, S. M. (2008). Does Scale Exist? An Epistemological Scale Continuum for Complex Human-Environment Systems. *Geoforum*, 39(2), 776–788. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.09.010>

Marston, S. A. (2017). The Social Construction of Scale. In *Politics: Critical Essays in Human Geography* (Vol. 24, pp. 297–320). <https://doi.org/10.4324/9781315246512-17>

McCarthy, J. (2005). Scale, Sovereignty, and Strategy in Environmental Governance. *Antipode* (Vol. 37, Issue 4, pp. 731–753). <https://doi.org/10.1111/j.0066-4812.2005.00523.x>

McKinnon, I., & Hiner, C. C. (2016). Does the Region Still have Relevance? (Re)considering “regional” Political ecology. *Journal of Political Ecology*, 23(1), 115–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.2458/v23i1.20182>

Miller, F. P., & McGregor, A. (2019). Rescaling political ecology? World regional approaches to climate change in the Asia Pacific. *Progress in Human Geography*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/0309132519849292>

Molle, F. (2007). Scales and Power in River Basin Management: The Chao Phraya River in Thailand. *Geographical Journal*, 173(4), 358–373. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2007.00255.x>

- Nasution, Pangeran. (2013). *Jurnal Antropologi Indonesia*. 34(2), 152–163.
<https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3970>
- Natter, W., & Zierhofer, W. (2002). Political Ecology, Territoriality and Scale. *GeoJournal* (Vol. 58, Issue 4, pp. 225–231).
<https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000017953.56964.d1>
- Neumann, R. (2005). *Making Political Ecology*. Hodder Arnold.
- Nzeadibe, A. C., Uchem, R. N., & Nzeadibe, T. C. (2018). Beyond “Traditional Geographies”: Integrating Urban Political Ecology and Cultural Sustainability Into Undergraduate Geographical Education in Nigeria. *Journal of Environmental Education*, 49(3), 228–241.
<https://doi.org/10.1080/00958964.2017.1391162>
- Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (2004). *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements* (2nd ed.). Routledge.
- Peluso, N. L. (1993). "Traditions" of Forest Control in Java: Implications for Social Forestry and Sustainability.” *Global Ecology & Biogeography Letters*, 3(4–6), 183–157. <https://doi.org/10.2307/2997766>
- Peluso, N. L. (2017). Whigs and hunters: the origins of the Black Act, by E.P. Thompson. *Journal of Peasant Studies*, 44(1), 309–321.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1264581>
- Poerwanto, H. (2008). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar.
- Robbins, P. (2020). Is less more ... or is more less? Scaling the Political Ecologies of the Future. *Political Geography*, 76.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.04.010>
- Rocheleau, D. E. (2008). Political Ecology in the Key of Policy: From Chains of Explanation to Webs of Relation. *Geoforum*, 39(2), 716–727.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.02.005>
- Roseberry, W. (1998). Political Economy. *Annual Review of Anthropology*, 17(1988), 161–185. <http://www.jstor.org/stable/2155910>
- Sayre, N. F. (2005). Ecological and Geographical Scale: Parallels and Potential for Integration. *Progress in Human Geography*, 29(3), 276–290.
<https://doi.org/10.1191/0309132505ph546oa>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

- Sundberg, J. (2015). Ethics, Entanglement and Political Ecology. *The Routledge Handbook of Political Ecology*, August, 117–126. <https://doi.org/10.4324/9781315759289.ch8>
- Sutton, M. Q., & Anderson, E. . (2004). *Introduction to Cultural Ecology*. AltaMira Press.
- Swyngedouw, E. (1997). Neither Global Nor Local: “Glocalization” and The Politics of Scale. In K. Cox (Ed.), *Spaces of Globalization: Reasserting The Power of The Local* (pp. 137–166). Guilford Press. <http://goya.ceu.hu/search/X?searchtype=t&searcharg=Spaces+of+globalization+%3A+Reasserting+the+power+of+the+local&submit.x=41&submit.y=5>
- Swyngedouw, E. (2004). Scaled Geographies: Nature, Place and the Politics of Scale.” Dalam Sheppard, E. dan McMaster, R.B. (eds.). In *Scale and Geographic Inquiry*. Blackwell Publishing.
- Swyngedouw, E., & Heynen, N. C. (2003). Urban Political Ecology, Justice and The Politics of Scale. *Antipode* (Vol. 35, Issue 5, pp. 898–918). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2003.00364.x>
- Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Wolf, E. R. (2010). *Europe and the People without History*. University of California Press.
- Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., & Pawson, R. (2013). RAMESES publication standards: Meta-narrative reviews. *Journal of Advanced Nursing*, 69(5), 987–1004. <https://doi.org/10.1111/jan.12092>
- Zimmerer, K.S. (2000). Rescaling Irrigation in Latin America: The Cultural Images and Political Ecology of Water Resources. *Ecumene*, 7(2), 150–175. <https://doi.org/10.1191/096746000701556680>
- Zimmerer, K.S., & Bassett, T.J. (2003). Approaching Political Ecology: Society, Nature, and Scale in Human–Environment Studies. *Political Ecology: An Integrative Approach to Geography and Environment-Development Studies*, 1–25. New York: Guilford Press.